

KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH: STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 DI DESA SIDO ASRI

Nabila Nur Khalik¹, Fathul Mu'in², Nur Rahmah³

^{1,2,3}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email Korespondensi: nurkhaliknabila@gmail.com

Email: fathulmuin@radenintan.ac.id; nurrahmah@radenintan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of geological disaster mitigation policies based on South Lampung Regency Regional Regulation Number 11 of 2014 in Sido Asri Village, Candipuro District, South Lampung Regency from a siyasah tanfidziyah perspective. This research is motivated by the ongoing occurrence of flooding that impacts community activities and lives, while the implementation of disaster mitigation by the local government is considered not yet optimal. The study used a field research method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results of the study indicate that the implementation of geological disaster mitigation policies in Sido Asri Village still faces various obstacles. This is evident from the still limited preventive measures, lack of disaster socialization to the community, budget constraints, and the less than optimal development of flood control infrastructure such as drainage and embankments. In addition, the implementation of disaster mitigation is still more focused on handling after a disaster occurs rather than prevention efforts before a disaster occurs. From a public policy perspective, the government has a responsibility to implement policies to achieve public welfare and protect lives and property. Therefore, strengthening preventive measures, improving inter-agency coordination, and engaging the public is necessary to ensure more effective and sustainable disaster mitigation.

Keywords: Disaster Mitigation Policy, Siyasah tanfidziyah, Policy Implementation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 di Desa Sido Asri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya banjir yang berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat, sementara pelaksanaan mitigasi bencana oleh pemerintah daerah dinilai belum berjalan secara optimal. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi di Desa Sido Asri masih menghadapi berbagai kendala. Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya langkah preventif, kurangnya sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum maksimalnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase dan tanggul. Selain itu, pelaksanaan mitigasi bencana masih lebih berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi dibandingkan upaya pencegahan sebelum bencana berlangsung. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan langkah

preventif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Mitigasi Bencana, Siyash Tanfidziyah, Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis dan geologis Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik (Tanjung et al., 2020). Kondisi tersebut menyebabkan berbagai jenis bencana baik geologi maupun hidrometeorologi. Diantara berbagai bencana, banjir merupakan bencana alam yang terjadi di kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai dan pada setiap datangnya musim penghujan, seperti yang terjadi di Desa Sido Asri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan yang rentan terhadap bahaya banjir. Kondisi ini dipengaruhi oleh aliran sungai Way Galih dan sungai Way Katibung sebagai sumber banjir. Peristiwa tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Arashi et al., 2024).

Bencana banjir yang sering terjadi di Desa Sido Asri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam saja tetapi berkaitan erat dengan aktivitas manusia, perubahan penggunaan lahan dan kerusakan area penyerapan air. Secara lebih spesifik, banjir dapat dipicu oleh curah hujan yang tinggi, luapan sungai, kerusakan bendungan, kerusakan tanggul, saluran drainase yang tersumbat, dan melemahnya fungsi retensi Daerah Aliran Sungai (DAS). Seiring dengan semakin besarnya dampak faktor-faktor tersebut dari tahun ke tahun, banjir telah menjadi hal yang tak terhindarkan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang daerah aliran sungai Way Galih dan Way Katibung.

Hingga saat ini, banjir tahunan terus terjadi di daerah aliran sungai Way Galih, terutama di Desa Sido Asri. Selain itu banjir dapat terjadi dengan karakteristik yang berbeda, mulai dari peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dengan genangan yang singkat hingga peristiwa yang berlangsung lama dengan banjir yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya dipengaruhi faktor alam tetapi juga oleh lemahnya perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan (Hale, Carlos Boromeus, Ludovikus Bomans Wadu, 2021).

Pada tahun-tahun sebelumnya, kerusakan bendungan dan tanggul sungai saat hujan di Desa Sido Asri meluap yang mengakibatkan lahan pertanian seperti sawah dan beberapa pemukiman warga terendam. Ditandai juga pada peristiwa banjir besar yang terjadi pada 27 Oktober 2022 menjadi salah satu bukti nyata tingkat kerentanan Desa Sido Asri dalam pelaksanaan mitigasi. Dalam peristiwa tersebut, air mencapai ketinggian lutut hingga pinggang orang dewasa dan merendam rumah sebagian rumah warga, fasilitas umum, serta lahan pertanian (B. L. Selatan, 2022). Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Situasi diperparah dengan robohnya jembatan penghubung antara Desa Sido Asri dan Desa Cintamulya pada 14 Maret 2025, jembatan tersebut roboh akibat pondasi menghadapi tekanan air yang tinggi. Kejadian ini menunjukkan bahwa infrastruktur penting yang seharusnya diperkuat melalui program mitigasi tidak mendapatkan perhatian memadai hingga saat ini (D. P. L. Selatan, 2025).

Melihat kondisi tersebut penanggulangan banjir tidak cukup hanya saat bencana terjadi melainkan perlu dilakukan upaya mitigasi yang terencana dan berkelanjutan. Mitigasi merupakan serangkaian upaya penting untuk mengurangi risiko melalui perencanaan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat (Ma'arif, 2019). Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi. Dalam Pasal 6 secara tegas mengatur bahwa pelaksanaan mitigasi mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan langkah-langkah pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana (P. K. L. Selatan, 2014). Namun dalam praktiknya, regulasi tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dilihat dari fakta lapangan

di Desa Sido Asri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan yang masih sering mengalami banjir menunjukkan adanya kesenjangan bahwa implementasi kebijakan mitigasi tersebut belum memadai, meskipun dengan intensitas banjirnya untuk saat ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada landasan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014, penerapan mitigasi bencana tingkat lokal masih menemui berbagai kendala. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan mitigasi telah diterapkan dengan efektif dalam mengurangi risiko bencana banjir di Desa Sido Asri. Urgensi penelitian ini semakin kuat karena banjir yang terjadi berulang kali tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, kegiatan sosial, serta kelangsungan pembangunan daerah. Dalam pandangan siyasah syar'iyah, setiap kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dan menghindari kemudaratatan bagi masyarakat, sehingga pelaksanaannya perlu dievaluasi secara berkelanjutan (Muhammad Wahdini et al., 2025).

Dengan demikian, diperlukan peran aktif pemerintah desa sebagai representasi otoritas al -sulthah al-tanfidziyah (kewenangan melaksanakan pemerintahan) untuk mengimplementasikan kebijakan mitigasi bencana secara optimal dan berkelanjutan, melalui upaya pencegahan, pengurangan risiko, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat (, Syaiful Aziz, n.d.). Namun selain itu, pendekatan kajian yang digunakan juga belum banyak mengaitkan implementasi kebijakan mitigasi tersebut dengan perspektif siyasah tanfidziyah. Dalam perspektif islam fenomena ini dapat dianalisis dengan pendekatan siyasah tanfidziyah yaitu cabang fiqh siyasah yang menekankan pelaksanaan otoritas pemerintah oleh penguasa guna menjamin keadilan dan kemaslahatan umum (masalah ammah) (Iqbal, 2014).

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014, telah diterapkan dalam praktiknya. Analisis juga dilakukan dari perspektif Siyasah Tanfidziyah guna menilai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan mitigasi bencana. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas (1) terkait bagaimana implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 di Desa Sido Asri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan juga (2) memaparkan bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi di Desa Sido Asri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

Pada penelitian tahun-tahun sebelumnya tentang mitigasi bencana sebagian cenderung berfokus pada aspek teknis dan kebijakan secara umum, seperti penanggulangan bencana serta risiko manajemen. Adapun, penelitian terdahulu yang telah mengungkapkan sejumlah temuan terkait kebijakan mitigasi bencana. Pertama, kajian penelitian yang dilakukan oleh Feny Irfany dan Yaya M Abdul Aziz pada Jurnal Ilmu Administrasi, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Hasil penelitian tersebut belum berjalan optimal karena masih rendahnya tingkat sosialisasi serta koordinasi antar pihak terkait dan minimnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama belum optimalnya upaya mitigasi bencana (, Yaya M Abdul Aziz, 2020).

Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Ayu Sekar Ningrum dan Kronika Br. Ginting pada Jurnal (GEOSSEE), dalam penelitiannya membahas strategi penanganan banjir yang berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan banjir di daerah aliran Sungai Seulalah Kota Langsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat risiko bencana banjir dan membuat rencana mitigasi untuk kawasan rawan banjir tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua jenis mitigasi banjir yakni mitigasi struktural, yang mencakup pembangunan tanggul, perbaikan jaringan drainase, dan pembangunan bangunan pengendali banjir; dan mitigasi nonstruktural, yang mencakup pelatihan, simulasi kebencanaan, dan evaluasi kebijakan pengurangan risiko bencana. Namun, kendala yang ditemukan dalam penelitian tersebut termasuk tingginya tingkat kerentanan kawasan permukiman di sekitar aliran sungai, penataan tata ruang yang tidak ideal, dan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana banjir (,

Kronika Br. Ginting, Ayu Sekar, 2020).

Penelitian yang ketiga, yang dilakukan oleh Mulyani Zulaeha, Lies Ariany, Akhmad Hendryan Dwifama, Rizka Annisa Falmelia, dan Muhammad Shofwan Ridhan pada Jurnal Prosiding Seminar Lingkungan Nasional Lahan Basah, kajian penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya frekuensi banjir di Kalimantan Selatan, yang terus berulang meskipun berbagai kebijakan mitigasi telah diterapkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, secara teoritis, kebijakan mitigasi bencana memang telah ada, namun dalam implementasinya belum optimal. Hal ini terlihat dari dampak banjir yang masih parah serta upaya pengurangan risiko yang belum memadai. Kondisi ini disebabkan oleh kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta pendekatan yang cenderung reaktif. Selain itu, rendahnya kesiapsiagaan masyarakat juga turut berkontribusi terhadap terbatasnya efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut (Lies Ariany, Akhmad Hendryan Dwifama, Rizka Annisa Falmelia, Muhammad Shofwan Ridhani, 2022).

Penelitian yang keempat, dilakukan oleh Miskiah, Agus Sya'bani Arlan, dan Mahdalina pada Jurnal Pelayanan Publik mengkaji peran Pemerintah Desa Pimping di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dalam mitigasi banjir. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling menunjukkan bahwa pemerintah sudah mantap dalam menggerakkan masyarakat dan mengatur aturan dasar, tetapi masih lamban dalam persoalan inovasi infrastruktur seperti drainase atau sosialisasi pencegahan banjir masih belum optimal. Faktor pendukung lainnya meliputi rasa tanggung jawab sosial perangkat desa, sedangkan hambatan utamanya adalah keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat (Agus Sya'bani Arlan, Mahdalina, 2024).

Dan terakhir penelitian yang kelima, yang dilakukan oleh Adelia Hasu, Lisda Van Gobel, dan Yahya Antu pada Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peran sebagai koordinator dengan BPBD dan BPD, motivator, serta pengawas belum sepenuhnya efektif, sebagaimana terlihat dari lambatnya respons BPBD, kurangnya pengerukan daerah sungai, dan kebiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Rendahnya partisipasi dari masyarakat sekitar menjadi salah satu masalah utama yang memperparah situasi ini (Lisda Van Gobel, Yahya Antu, 2023).

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu telah mencakup fokus yang beragam, terutama aspek sosial, teknis dalam manajemen bencana, serta administrasi pemerintahan. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis kebijakan daerah dalam manajemen bencana, khususnya terkait implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Geologi Daerah, dengan penekanan pada pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan paparan tersebut, kebijakan mitigasi menjadi relevan untuk dikaji, namun penelitian secara spesifik yang menganalisis tentang implementasi kebijakan mitigasi dari sudut pandang siyasah tanfidziah masih relatif terbatas. Untuk itu, tujuan penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara spesifik implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 sekaligus menghadirkan kebaharuan (novelty) dengan meninjaunya dalam perspektif siyasah tanfidziah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Erri Wahyu Puspitarini, Ina Sholihah Widiati, Indo Intan, Sa'dianoor, Muh. Nurtanziz Sutoyo, Fathul Mu'in, 2026). Penelitian ini dilaksanakan pada April 2026 di Desa Sido Asri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dengan fokus pada implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi mendalam dengan lima informan yang dipilih

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

205

Indexed



SINTA 4



menggunakan teknik purposive sampling, yakni kepala Desa Sido Asri, tiga orang warga desa, serta satu tokoh masyarakat / ketua RT /RW setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan dan memeriksa data kembali yang telah diperoleh dari hasil observasi wawancara, dan dokumentasi (Iman, 2013). Data kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini diterapkan guna memperkuat validitas temuan serta menjamin konsistensi interpretasi data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pendekatan metodologis tersebut, diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan upaya mitigasi bencana di Desa Sido Asri.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Geologi di Desa Sido Asri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi berdasakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 sesuai Pasal 6 pada dasarnya mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya mitigasi bencana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko bencana geologi. Ketentuan ini menekankan bahwa mitigasi bencana ini tidak hanya terbatas pada penanggulangan bencana setelah bencana itu terjadi, melainkan juga mencakup langkah-langkah pencegahan dan upaya pengurangan risiko sebelum bencana terjadi (Haeril, Mas'ud, Taufik Irfadat, 2021).

Berlandaskan ketentuan tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan berbagai langkah mitigasi, seperti menyusun kebijakan penanggulangan bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana, mengurangi risiko bencana, serta mengembangkan infrastruktur untuk mendukung upaya mitigasi. Dengan demikian, Pasal 6 tidak hanya menetapkan pemerintah sebagai pihak yang bertugas menanggapi bencana ketika terjadi, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencegahan bencana yang berkelanjutan. Secara normatif, upaya mitigasi bencana harus dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, implementasi kebijakan harus diwujudkan melalui berbagai program konkret, seperti pengerukan saluran air, perbaikan tanggul, edukasi kebencanaan, hingga kegiatan gotong royong masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Berdasarkan temuan lapangan implementasi kebijakan mitigasi bencana di Desa Sido Asri, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dalam Pasal 6 belum sepenuhnya berjalan secara efektif mengurangi risiko banjir. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program mitigasi bencana. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti drainase dan tanggul penahan air. Selain itu, terkait sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara rutin. Oleh sebab itu, banjir masih sering terjadi di persawahan milik masyarakat selama musim hujan. Situasi ini tidak hanya terjadi sekali atau dua kali melainkan menjadi masalah yang berulang setiap tahun. Genangan air yang merambah area persawahan mengganggu aktivitas pertanian serta menyebabkan kerugian ekonomi bagi para petani setempat. "Wantoni, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Desa Sido Asri (Kabupaten Lampung Selatan, 27 April 2026)."

Pemerintah desa telah berkoordinasi juga dengan pihak kecamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan terkait upaya mitigasi bencana di wilayah tersebut. Selain itu, sosialisasi terkait kebencanaan juga pernah dilakukan, meski hanya beberapa saja yang diikuti sertakan warga atau pihak aparat desa yang diseleksi untuk terlibat dalam kegiatan tersebut di tingkat kecamatan. "Wantoni, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Desa Sido Asri (Kabupaten Lampung Selatan, 27 April 2026). Setelah kegiatan tersebut selesai, pemerintah desa pun terus berkoordinasi lanjutan dengan

BPBD mengenai langkah-langkah penanggulangan yang mungkin dilakukan.

Namun demikian, warga setempat mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kebijakan di tingkat administratif dan kondisi yang secara langsung dialami oleh masyarakat. Sebagian warga masyarakat melaporkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan ataupun mengikuti sosialisasi terkait upaya mitigasi bencana secara rutin maupun berkelanjutan. Bahkan masyarakat menilai bahwa pejabat pemerintah daerah serta aparatur desa lebih sering hadir setelah banjir terjadi daripada mengambil langkah-langkah dalam pencegahan sebelum bencana melanda. Kondisi ini menunjukkan implementasi kebijakan mitigasi masih cenderung reaktif daripada preventif (Saputra et al., 2026). Pada dasarnya, mitigasi bencana bertujuan untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi melalui berbagai langkah strategis yang dilaksanakan secara terencana.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan pasca-bencana, akan tetapi juga memperkuat upaya pencegahan melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, normalisasi saluran air, perbaikan tanggul, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Selain itu, warga juga memaparkan bahwa bantuan yang mereka terima saat banjir besar pada beberapa tahun lalu sebagian besar berasal dari yayasan kemanusiaan bukan dari pemerintah daerah. Atas dasar hal tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial saat terjadi bencana. Ditinjau dari aspek prasarana, ditemukan bahwa beberapa tanggul di sekitar area persawahan belum diperbaiki dengan baik, meskipun kerusakan tersebut telah terjadi cukup lama. Selain itu tidak ada program yang rutin dijalankan seperti gotong royong pembersihan sungai, pengerukan saluran air, atau pemeliharaan drainase yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh aparatur desa yang bekerja sama dengan masyarakat. Akibatnya, ketika intensitas curah hujan yang meningkat, air dengan mudah meluap ke area persawahan yang menyebabkan banjir.

Berdasarkan analisis teori implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III beberapa faktor penyebab pelaksanaan kebijakan tidak efektif ditandai oleh faktor sumber daya, komunikasi, sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi (AG. Subarsono, 2012). Dalam penelitian ini, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berjalan dengan efektif. Selain itu, lambatnya dalam perbaikan infrastruktur dan minimnya program mitigasi berkelanjutan pada masyarakat mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Temuan penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gregorius Agung Setyonugroho dalam jurnal internasional yang berjudul "Policy Implementation Model Review of the Post-Disaster Housing Reconstruction in Indonesia Case Study: Aceh, Yogyakarta, and Lombok," menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kebencanaan sangat bergantung pada kolaborasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan rencana pelaksanaan yang berkelanjutan. (Maki Norio, 2024) Kebijakan penanggulangan kebencanaan tidak akan berhasil jika mereka hanya berfokus pada penanganan setelah bencana tanpa memperkuat langkah-langkah mitigasi sebelum bencana.

Selain itu, dalam jurnal "Disaster Preparedness and Mitigation in Indonesia : A Narrative Review" menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi banyak masalah dalam melakukan mitigasi bencana, terutama dalam hal koordinasi, kesiapsiagaan masyarakat, dan keberlanjutan program pengurangan risiko bencana (Ayuningtyas et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan keadaan di wilayah penelitian, yang menyatakan bahwa mitigasi bencana belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dari sudut pandang hukum konstitusional untuk menerapkan kebijakan publik secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan mitigasi bencana geologi di desa sido asri sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 harus diterapkan secara menyeluruh melalui tindakan konkret yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat dan tidak terbatas pada urusan administratif. Pengawasan, kemampuan manajemen, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah (Mayyadah et al., 2025). Berkaitan dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa kekurangan sumber daya dan layanan publik yang buruk dapat menyebabkan pelaksanaan

kebijakan yang kurang efektif.

Maka dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi di Desa Sido Asri dalam Pasal 6 belum diterapkan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan banjir yang terus berulang di kawasan persawahan selama musim hujan, kondisi perbaikan infrastruktur pengendalian banjir yang buruk, minimnya sosialisasi pada masyarakat, dan kurangnya upaya mitigasi yang berkelanjutan.

Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Geologi

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, memikul tanggung jawab utama untuk melaksanakan kebijakan negara secara efisien demi kepentingan umum. Peran ini tidak hanya terbatas pada perumusan peraturan itu juga mencakup pengawasan, pelaksanaan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan secara nyata melindungi serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Radda Pujangga, Relit Nur Edi, Rudi Santoso, 2025). Dengan demikian, siyasah tanfidziyah menekankan pada tercapainya urusan kemaslahatan umum serta pencegahan kerusakan dalam kehidupan masyarakat (Jalb al Mashalih wa daf' al-mafasid) dalam konteks pemerintahan.

Bencana tidak hanya dipandang sebagai peristiwa alam semata, melainkan juga berkaitan dengan degradasi lingkungan dan lemahnya tata kelola pemerintahan dalam menjalankan fungsi pencegahan bencana secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip maqāṣid al-sharī'ah dan perlindungan lingkungan kemaslahatan umum memiliki keterkaitan dengan upaya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat (Fardiansyah & Fikri, 2026).

Dalam kerangka siyasah syar'iyah, kebijakan publik harus merealisasikan lima tujuan utama syariat (maqāṣid al-sharī'ah), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Khalisatun Nurussa'adah, Akhmad Zaki Yamani, 2025). Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah idealnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfokus pada perlindungan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat membahayakan nyawa dan harta benda. Dengan demikian, penerapan kebijakan mitigasi bencana geologi dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat melalui pencegahan bencana dan pengurangan risiko bukan hanya sekedar formalitas administratif. Pelaksanaan mitigasi yang efektif harus diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, normalisasi saluran air, perbaikan tanggul, sosialisasi terkait mitigasi bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan merupakan cara terbaik untuk meminimalkan bencana.

Prinsip tanggung jawab pemerintah dalam islam ditegaskan dalam firman Allah SWT. Qur'an surah An-Nisa' Ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa' 4:58)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan adil dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi amanah dalam hal mitigasi bencana dengan membuat kebijakan yang dapat melindungi masyarakat dari banjir. Maka dapat dipahami bahwa, jika upaya mitigasi belum mencapai tingkat yang ideal, seperti keterlambatan dalam perbaikan tanggul, kurangnya normalisasi sungai, dan sosialisasi kesadaran masyarakat yang tidak memadai terkait bencana, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah pemerintah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

208

Indexed



SINTA 4



“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya” (H.R. Bukhari, no. 2554 dan Muslim, no.1829).

Hadis ini menekankan bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika seorang pemimpin menjalankan tanggung jawab ini dengan buruk, mereka akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan kaidah fiqh siyasah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa keputusan seorang pemimpin pemerintahan harus senantiasa berfokus kepada kesejahteraan masyarakat, sebab seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan atas yang dipimpinnya (Idrus, 2021). Salah satu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menetapkan sebuah kebijakan. Jika kita berpegang kepada kaidah tersebut, maka keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin atau kebijakan yang diambil haruslah memiliki tujuan yang baik, yang mendatangkan manfaat bagi mereka yang dipimpinnya.

Maka dapat dipahami bahwa, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan yang memadai dari ancaman bencana. Banjir berulang yang terjadi di Desa Sido Asri menunjukkan bahwa upaya mitigasi belum dilakukan secara optimal. Meskipun pemerintah telah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah kecamatan, langkah-langkah pencegahan yang diambil belum cukup untuk mengurangi kemungkinan banjir secara signifikan. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan masih lebih reaktif daripada preventif.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemerintah lebih sering hadir setelah banjir daripada melakukan tindakan dalam upaya pencegahan sebelum bencana. Selain itu, kurangnya sosialisasi kebencanaan menyebabkan masyarakat kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana banjir. Dalam hal infrastruktur, beberapa tanggul dan saluran air masih belum diperbaiki secara menyeluruh meskipun kerusakan telah terjadi sejak lama. Akibatnya, ketika curah hujan meningkat, air dengan mudah meluap dan merendam area persawahan masyarakat. Sejalan dengan hasil tersebut, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 masih belum diterapkan secara efektif.

Implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 dengan konsep siyasah tanfidziyah, menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk menerapkan aturan secara formal, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan yang mereka buat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat harus menjadi kemampuan pemerintahan yang baik. Jika masyarakat terus mengalami kerugian akibat banjir, kebijakan mitigasi belum sepenuhnya mencapai tujuan kemaslahatan secara keseluruhan menurut prinsip siyasah tanfidziyah.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah syar’iyyah adalah cara pemerintah mengelola urusan umum untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Khallaf, 1977). Oleh karena itu, karena tujuan menjaga keselamatan jiwa dan harta masyarakat, kebijakan mitigasi bencana merupakan bagian dari siyasah syar’iyyah. Untuk melindungi masyarakat sepenuhnya dari bencana, pemerintah daerah dalam hal ini harus memperkuat upaya mitigasi berkelanjutan.

Selain itu, dari perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dilakukan secara amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan oleh penguasa untuk kepentingan umum, bukan hak mutlak bagi penguasa. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi bencana diterapkan secara optimal, bukan hanya dalam hal administrasi semata (Zuhriani et al., 2023). Mengacu pada hal tersebut, kurangnya pelaksanaan mitigasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah

masih perlu meningkatkan efektivitas kebijakannya, terutama dalam hal pengawasan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi pengawasan yang efektif juga sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana. Pengawasan sangat penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang baik, pemerintah daerah dapat melaksanakan program mitigasi bencana dengan lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Santoso et al., 2021). Dari sudut pandang siyasah tanfidziyah, pengawasan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa amanah kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 sesuai pada Pasal 6 menunjukkan adanya keterkaitan dengan prinsip siyasah tanfidziyah, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya memiliki wewenang untuk menetapkan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Namun, pelaksanaan mitigasi bencana di Desa Sido Asri belum optimal secara empiris. Hal ini ditunjukkan dengan banjir yang terus berulang, kurangnya upaya preventif, kurangnya sosialisasi terkait kebencanaan, dan kurangnya infrastruktur untuk mengendalikan banjir. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan normatif dan praktik di lapangan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana harus ditingkatkan secara berkelanjutan dan lebih efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi di Desa Sido Asri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 sesuai dengan Pasal 6 belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari masih terdapat keterbatasan dalam langkah preventif pemerintah daerah, sehingga banjir masih terus berulang karena kurangnya sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, serta belum maksimalnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase dan tanggul. Selain itu, pelaksanaan mitigasi bencana masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, serta rendahnya langkah mitigasi yang bersifat preventif sehingga penanganan bencana masih cenderung dilakukan setelah banjir terjadi dibandingkan sebelum bencana berlangsung.

Berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan mitigasi bencana mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menerapkan kebijakan secara efisien demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta melindungi jiwa dan harta benda dari ancaman bencana. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep maqāṣid al-sharī'ah dan kaidah fiqh tasarruf al-imam 'ala al-raiyyah manutun bi al-maslahah, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus bergantung pada kemaslahatan umum. Akan tetapi, secara empiris penerapan kebijakan mitigasi bencana geologi dalam Pasal 6 belum sepenuhnya mengindikasikan prinsip siyasah tanfidziyah, karena masih terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dan kenyataan di lapangan. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana melalui tindakan pencegahan yang lebih nyata, seperti perbaikan tanggul, normalisasi aliran air, dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah desa dan BPBD harus memperbaiki sosialisasi serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat supaya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir dapat meningkat. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat juga penting agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berlangsung lebih efisien, terstruktur, dan fokus pada kepentingan masyarakat.

REFERENSI

- Agus Sya'bani Arlan, Mahdalina, M. (2024). Peran Pemerintah Desa Pimping Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(3), 784–794.
- Erri Wahyu Puspitarini, Ina Sholihah Widiati, Indo Intan, Sa'dianoor, Muh. Nurtanziz Sutoyo, Fathul Mu'in, F. D. (2026). *Buku Ajar Metodologi Penulisan Karya Ilmiah* (Efitra (ed.)). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yq_CEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA16&ots=tu8NrC0LXw&sig=9YWFieWeTCNxaiUmtBzPsfwky6w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Kronika Br. Ginting, Ayu Sekar, N. (2020). Strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir di daerah aliran sungai seualah kota langsa 1,2. *Geogrophy Science Education Journal (GEOSEE)*, 1(1).
- Lies Ariany, Akhmad Hendryan Dwifama, Rizka Annisa Falmelia, Muhammad Shofwan Ridhani, M. Z. (2022). Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Lingkungan Nasional Lahan Basah*, 7(April), 150–159.
- Lisda Van Gobel, Yahya Antu, A. H. (2023). Peran Kepala Desa dalam Menanggulangi Banjir di Desa Monas Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2040–2047.
- Maki Norio, G. A. S. N. (2024). Policy implementation model review of the post-disaster housing reconstruction in Indonesia case study: Aceh, Yogyakarta, and Lombok. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 100(1044181). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2023.104181>
- Syaiful Aziz, A. H. (n.d.). Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom pada Perkara Hadhânah di Pengadilan Agama dalam Perspektif Maqâshid al-Syarî ' ah. *Al- 'Adalah*, 125–150.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383>
- Yaya M Abdul Aziz, F. I. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1973), 50–60.
- AG. Subarsono. (2012). Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi. : Pustaka Pelajar.
- Arashi, F. B., Iskandar, A. L., Sarifah, F., Azril, M., Ramadhan, R., Daniswara, M. P., & Rahmadhani, F. (2024). Analisis Dampak Bencana Banjir terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi pada Masyarakat. *Bandar: Journal Of Civil Engineering*, 6(2), 56–64.
- Ayuningtyas, D., Windiarti, S., Sapuan Hadi, M., Fasrini, U. U., & Barinda, S. (2021). Disaster preparedness and mitigation in indonesia: A narrative review. *Iranian Journal of Public Health*, 50(8), 1536–1546. <https://doi.org/10.18502/ijph.v50i8.6799>
- Fardiansyah, A. I., & Fikri, A. (2026). Integrating Sustainable Environmental Law and Maqâsid al - Sharî ' ah : A Preventive Legal Framework for Disaster Governance in Disaster-Prone Regions Integrating Sustainable Environmental Law and Maqâs id al- Sharî ' ah : A Preventive Legal Framework for. 1(1), 30–47.
- Haeril, Mas'ud, Taufik Irfadat, H. (2021). Implementation of Disaster Mitigation Policies (Structure and. *Journal of Governance and Local Polirtics (JGLP)*, 3(1), 23–47.
- Hale, Carlos Boromeus, Ludovikus Bomans Wadu, A. F. G. (2021). Keterlibatan warga negara dalam pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 12(1), 447-453.
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123.
<https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Iman, G. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Teori Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Premnadamedia Group.
- Khalisatun Nurussa'adah, Akhmad Zaki Yamani. (2025). Imlementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah Dalam

- Kebijakan Publik Di Negara Islam. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 15(1).
<https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365>
- Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (p. 15). Dar Al-Ansar.
- Ma'arif, S. (2019). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Pustaka Pelajar.
- Mayyadah, P., Nur, Efa Rodiah, & Sukandi, A. (2025). Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 271–280. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8169>
- Muhammad Wahdini, Hasse Jubba, & Kamsi. (2025). Reconciling Ecological Ethics and Legal Politics: A Siyāsah Shar‘iyyah Perspective on Muhammadiyah’s Mining License. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 229–243. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.27325>
- Radda Pujangga, Relit Nur Edi, Rudi Santoso. (2025). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Hukum Adat Dalam Sistem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(2, April).
- Santoso, R., Shulton A, H., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Saputra, S. A., Mulyana, Y., & Purwanto, A. J. (2026). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara. *JHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 6(3), 2106–2113.
- Selatan, B. L. (2022). Laporan Kejadian Banjir Lampung Selatan. *AntaraneWS.Com*.
<https://lampung.antaraneWS.com/berita/660441/kemarin-tiga-kecamatan-di-lampung-selatan-alami-banjir>
- Selatan, D. P. L. (2025). Laporan Kerusakan Jembatan Sidoasri-Cintamulya.
https://pupr.lampungselatankab.go.id/news-528?utm_source=
- Selatan, P. K. L. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Mitigasi Regional Bencana Geologi di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Tanjung, R., Mulyadi, D., Arifudin, O., & Rusmana, F. D. (2020). Manajemen Mitigasi Bencana. In CV Widina Media Utama.
- Wantoni. (n.d.). Kepala Desa Sido Asri.
- Zuhriani, Zaelani, A. Q., & Mu'in, F. (2023). Dynamics of Dismissal of Regional Heads in Lampung Province Perspective of Law and Fiqh Siyasah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(2), 202–210. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2443>